

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memperbaiki kualitas hidup akan menjadi persaingan ketat, oleh karena itu meningkatkan kualitas hidup manusia diperlukan sumber daya manusia yang

memiliki keahlian, keuletan, kejujuran, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme dan kerja keras agar mencapai kualitas yang lebih baik, jika sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan akan kalah dalam persaingan. Untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka banyak program yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah program keluarga harapan (PKH). Pada tahun 2017 pemerintah meluncurkan PKH guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang sangat miskin lewat bantuan tunai bersyarat yang dikhususkan dibidang kesehatan dan pendidikan.

Sebagai landasan untuk mengkaji dan memperjelas masalah dalam penelitian ini, maka di perlukan referensi dan sumber yang menjadi acuan dari hasil penelitian terdahulu mengenai program PKH untuk meningkatkan SDM .

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Slamet Agus Purwanto, tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kab. Mojokerto)” pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program keluarga harapan

dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini adalah program pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kecamatan Mojosari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program keluarga harapan di Kecamatan Mojosari mampu merubah pola pikir masyarakat miskin tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai kemiskinan.¹

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Yumiati Robaka tentang Studi Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Evaluasi Implementasi PKH Di Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Aspek pendidikan dengan indikatornya menurunnya anak putus sekolah, meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, dan pemberian uang tunai dapat dinilai cukup berhasil dan masyarakat setempat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan melalui PKH. 2) Aspek kesehatan dengan indikatornya meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, tersedianya bantuan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan dinilai cukup berhasil. Peserta program PKH sudah benar-benar merasakan ketersediaan bantuan selama ini

¹Tesis, Slamet Agus Purwanto, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*, Universitas Brawijaya Tahun 2012.

dimana para ibu hamil dan melahirkan diberi motivasi atau dianjurkan supaya memeriksa kandungan di Puskesmas atau Polindes terdekat.²

Dari kedua hasil penelitian terlebih dahulu yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Slamet Agus Purwanto, mengkaji tentang Program Keluarga Harapan dalam Memutus Rantai Kemiskinan, sedangkan oleh Yumiati Robaka tentang Studi Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan Sedangkan rencana penelitian ini lebih mengkaji tentang tata kelola PKH untuk meningkatkan sumber daya manusia di Desa Tango Molas Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur.

2.2 LANDASAN TEORITIS

2.2.1 Kebijakan Publik

Menurut Dunn mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.³ Kemudian menurut Anderson memberikan pengertian atas definisi “kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

²Skripsi, Yumiati Robaka, *Studi Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dikelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang*, Tahun 2010

³Syafiie dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta : Hal 107

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Frederich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan.⁴

Berdasarkan uraian diatas kebijakan publik merupakan adalah serangkaian pilihan-pilihan dari kegiatan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan yang saling berhubungan dan memiliki maksud dan tujuan dari pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kebijakan harus dibuat secara sistematis.

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi

⁴Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta : Hal 07

kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan sebagai berikut:⁵

1. Tujuan Kebijakan

Bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak demikian semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud, tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukungannya. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai yaitu: 1) Tujuan yang diinginkan berarti pertama-tama dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak dan kedua mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat. 2) Tujuan rasional merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal. Di sisi lain dalam kaitan dengan kriteria rasional atau realistis (*rational or realistic*). Tujuan biasanya ditetapkan setelah memperhitungkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku sumber daya yang dimiliki atau dapat dikuasai. Yang dimaksud dari sumber daya adalah factor-faktor pendukung. Factor pendukung manajemen publik ini sumber daya manusia (*human Resources*), *finance*, *logistics*,

⁵Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik: Partisipasi Dalam Proses Kebijakan* (Jakarta: Pancur Siwah 2004) Hal 45-54

information, participation and legitimation. 3) Tujuan baik dan masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran yang jelas, pola pikirnya runtun dan mudah dipahami langkah-langkah mencapainya. Pengertian jelas disini perlu mesti ditunjukkan secara kuantitatif. Yang penting orang dapat membedakan tercapai tidaknya tujuan dimaksud setelah suatu jangka waktu tertentu. 4) Tujuan berorientasi ke depan (*future oriented*). Ada tiga pengertian tentang orientasi kedepan ini: (a) tujuan kebijakan di maksud menimbulkan kemajuan kearah yang diinginkan atau berdasarkan angka atau criteria tertentu terlihat peningkatan. (b) tujuan yang ingin dicapai dimasa depan itu terletak dalam suatu jangka waktu tertentu, sehingga setelah suatu masa tertentu dapat dilakukan evaluasi atas hasil kebijakan itu. (c) orientasi sabar dan ulet. tujuan yang berada kedepan dalam jangka waktu tertentu diukur dalam pengertianb mencapai secara terus menerus tanpa henti.

2. Masalah.

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan, kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. Satu hal yang diperlukan dalam kaitan dengan kesalahan pemecahan masalah ini adalah terprosoknya orang untuk menganggap gejala sebagai masalah.

3. Tuntutan (*demand*).

Sudah diketahui partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan tersebut. Tuntutan muncul antara lain: a) karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang di buat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut serta dalam proses perumusan kebijakan, atau karena kalah dalam persaingan antara berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mungkin cukup besar dalam masyarakat. b) karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Karena itu, tuntutan jangan sekali-sekali dipandang sebagai hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai sebuah keberhasilan, sekalipun memang merepotkan. Kerepotan terjadi karena perbedaan persepsi dalam memandang tuntutan itu. Hal ini terutama sangat dirasakan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

4. Dampak(*outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Tiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan cirri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negative yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan. Berapa besar dampak yang terjadi untuk setiap jenis kebijakan susah diperhitungkan. Hal ini disebabkan antara lain karena: 1) tidak tersedianya informasi yang cukup. Mungkin data ada di lapangan pada

tingkat lokal, tetapi tidak ada data pada intansi tingkat nasional atau daerah. Sebab itu peran serta masyarakat bawahdalam proses penyusunan dan penilaian suatu kebijakan yang sangat penting.²⁾ dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu kebijakan perlu dilakukan pemisahan antar kelompok variable yang diukur (*control group*) dengan kelompok yang tidak diukur (*non-control group*). 3) proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dibidang sosial sudah diamati. Proses tersebut berbeda dalam tiap masyarakat dan tiap sector.

5. Saranaatau alat kebijakan (*policy instruments*).

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Jenis- jenis kebijakan publik

Menurut James Anderson menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:⁶

a. Kebijakan substantif

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

b. kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (pembuat kebijakan).

⁶James, E. Anderson, *Public Policy Making*, Second Edition (New York;Houghton Mifflincompany 1994) hal 14

- c. Kebijakan distributif kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.
- d. Kebijakan redistributive adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak.
- e. Kebijakan regulasi adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
- f. Kebijakan materi adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
- g. Kebijakan barang publik suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemamuran bagi masyarakatnya. Hal ini menuntut penyelenggara pemerintah untuk bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Salah satu factor yang menjadi tolak ukur maksimalnya penyelenggara pemerintahan adalah pembuatan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada tercapainya tujuan Negara tersebut. Kebijakan yang dibuat mengarah pada segala aspek kehidupan masyarakat, baik perekonomian, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Suatu kebijakan akan dinilai baik apabila dapat memberikan apa yang diharapkan oleh

pembuatnya. Namun berhasil tidaknya kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh cara penerapan dan pelaksana itu sendiri.

1.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

⁷Menurut Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

⁷Budi, Winarno. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses Kebijakan Publik Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.

Meter dan Horn dalam suharsonomengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;⁸

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasikebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberika dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau

⁸Suharsono. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.Yogyakarta.

menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Teori Marilee S. Grindle 1 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Teori ini dikenal dengan nama *Implementation as a Political and administrative Process*. Menurutny ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuhan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 macam yaitu Prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai.⁹

Tiga pilar yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program:

- a) Pengorganisasian. Struktur organisasi yang jelas dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas

⁹Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy :Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. ITS Press. Surabaya. Hal. 139

- b) Interpretasi. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c) Penerapan atau aplikasi. Perlu adanya pembuatan prosedur yang jelas agar program tersebut dapat dicapai.

2.2.4 Tata Kelola Program Keluarga Harapan

Tata kelola (*governance*) adalah kombinasi proses dan struktur yang diimplementasikan oleh dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan-kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. Tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian tata kelola selain melingkupi seluruh proses dan unsure-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas secara terus menerus untuk mencapai visi misi yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila dibarengi suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif, kesemuanya itu tidak terbentuk secara bertahap. Suasana yang akademik dan budaya yang kondusif,

harus diciptakan dengan menumbuhkan *awarenes* dan komitmen yang tinggi dari pelaku.¹⁰

Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti yang di jelaskan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada tahun bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah meliputi:¹¹

- 1) Partisipasi (*Participation*), setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berimp pendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Aturan Hukum (*Rule of Law*): kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang Hak-hak asasi manusia.
- 3) Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang

¹⁰Sulistiyani.A.T, (Editor) 2004*Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*.Penerbit Gaya Media. Yogyakarta

¹¹Irfan Islami, 2001, *Good Governance*, Insan Cendekia, Bandung Hal.8

membutuhkannya, dari informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

- 4) Daya tanggap (*Responsiveness*): setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*);
- 5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah;
- 6) Berkeadilan (*Equity*): pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;
- 7) Efektivitas dan Efisiensi (*Efectiveness and Eciency*): setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia;
- 8) Akuntabilitas (*Accountabilty*): para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sector public (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik

(*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda- beda, tergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal;

- 9) Bervisi Strategis (*Strategic Vision*): para pemimpin dan masyarakat memiliki perseptif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan manusia (*human development*).

Berdasarkan uraian diatas maka bisa dilihat bahwa tata kelola biasanya digunakan dalam upaya mengembangkan sebuah perusahaan, organisasi ataupun instansi pemerintahan kearah yang lebih lebih baik. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Lima komponen tujuan (SDGs) yang akan dibantu oleh PKH yaitu menghapus kemiskinan,

mengakhiri kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan jender dan kurangnya kesenjangan.

Program Keluarga Harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila di kelola secara baik dan Penyaluran dana bantuan tunai bersyarat dilakukan sesuai dengan efektif dan transparansi dan pedoman umum yang telah ditetapkan.